

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan karakter dan akhlak generasi muda sangatlah urgent, karena maju mundurnya suatu bangsa terletak pada baik tidaknya karakter dan akhlak generasi mudanya.

Sebagai suatu bangsa, Indonesia yang dihuni mayoritas muslim tidak ingin disebut sebagai bangsa yang gagal dalam melakukan *character building*, sebab kita semua harus berbuat banyak untuk bangsa ini. Dengan disediakannya pendidikan formal baik yang sekuler maupun yang bernuansa agama. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa generasi muda sekarang ini masih belum bisa bebas dari ancaman generasi punah, yakni sederet generasi lemah yang khawatir akan masa depannya karena potensi tumbuh kembangnya gagal dioptimalkan baik di dalam keluarga, sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan sarana untuk mencapai cita-cita, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan nasional, yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Karina, 2004), h. 5

Di Indonesia setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendidikan menjadi program utama dalam pembangunan nasional. “Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.”<sup>2</sup>

Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu di antara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Dalam ajaran Islam, pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya.

Tuntutan ini suatu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan arti pendidikan. Karena pendidikan mengarahkan kepada pembentukan kepribadian sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan sang pencipta, dengan masyarakat dan alam semesta menuju ke arah peningkatan yang bersifat positif.

Pendidikan yang diarahkan dalam pembangunan nasional adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> H.A.R Tilar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Indonesia, 2001), h. 13

Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah dan masyarakat. Fungsi keluarga adalah bagaimana mengembangkan peranannya dalam upaya membentuk kepribadian dan kemampuan anak<sup>3</sup>

Kenyataan yang terjadi pada saat ini dilapangan, sebagian anak kurang disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab di sekolah, tidak membuat pekerjaan rumah, mencoret coret bangku, tidak biasa antri, pada saat upacara bendera tidak tertib, tidak berpakaian dengan rapi, sering datang terlambat, menyerahkan tugas tidak tepat waktu, di dalam kelas selalu mengganggu teman, sering berkelahi, kurang hormat pada guru. Hal hal ini merupakan dasar dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. Kalau kebiasaan ini tidak menemukan pemecahan masalahnya maka tujuan pendidikan nasional akan sulit terwujud.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor dari dalam sekolah itu sendiri, yakni bisa dari diri siswa dan lingkungan dalam sekolah. Sementara faktor eksternal adalah faktor dari luar sekolah itu sendiri, baik keluarga siswa-siswi, lingkungan siswa-siswi tinggal.

Hukuman, seperti halnya “pil pahit”, tidak enak dimakan, tetapi mengandung manfaat! Oleh karena itu pendidik menempatkan hukuman sebagai “alat yang

---

<sup>3</sup> Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asian Foundation, 1999), h. 19

terakhir” digunakan apabila memang tidak ada upaya lain untuk mengatasi masalah, yaitu terjadinya perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib.<sup>4</sup>

Tidak ada seorangpun yang bergembira menerima hukuman, walaupun hukuman yang seringan-ringan dan seenak-enaknya. Siapapun yang akan menerima hukuman tentu merasakan “kepahitan” yang terkandung di dalamnya. Jika hukuman diterima oleh orang yang menerima hukuman tanpa adanya rasa sedih dan penyesalan akan perbuatan yang melanggar peraturan dan tata tertib, lalu diikuti oleh adanya sikap taubat dan jera agar tidak mau lagi mengulangi perbuatan atau kesalahannya itu.

Eksistensi pemberian sanksi berjenjang di sekolah pada siswa diharapkan dapat merubah sikap dari kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab menjadi anak yang berdisiplin dan bertanggung jawab.

Sikap keras kadang juga diperlukan dalam pendidikan pada anak agar supaya bisa disiplin, karena sikap yang lemah lembut atau nasehat saja kadang tidak mampu membuat anak menjadi baik atau merasa jera untuk melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Oleh karena itu, penerapan sanksi atau hukuman adalah salah satu jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin siswa di sekolah. Hukuman atau sanksi yang diterapkan bertujuan agar anak yang melanggar peraturan sekolah bisa berdisiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya sanksi mereka tidak akan ada rasa takut untuk melanggar peraturan atau tata tertib dan akan terus mengulang lagi perbuatannya. Tata tertib

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h. 167

sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya.<sup>5</sup>

Pendidikan yang disampaikan dengan cara lemah lembut tanpa didasarkan atas paksaan atau kekerasan akan lebih baik dari pada pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras karena hal ini akan berpengaruh besar kepada kejiwaan anak. Pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras akan membuat anak takut dan merasa tertekan dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan yang diinginkan dalam proses belajar mengajar tersebut mungkin tidak bisa tercapai dengan baik.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara untuk membentuk kepribadian yang beraturan dan memperbaiki sikap disiplin dalam hidup, akan tetapi hal semacam ini bukanlah hal yang utama dalam penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum hukuman itu dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasehat tidak mampu lagi dalam mengupayakan perbaikan, maka keadaan semacam itu harus dilakukan tindakan secara tegas yang dapat memposisikan persoalan kepada tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah berupa sanksi atau hukuman memiliki nilai edukatif.

Hal yang demikian tersebut, sanksi atau hukuman tersebut tidak perlu diterapkan bagi anak atau siswa yang masih mau mendengarkan segala nasehat dan perintah dari gurunya, karena pendidikan yang menggunakan sanksi atau hukuman tersebut kadang membawa dampak yang tidak baik bagi anak.

---

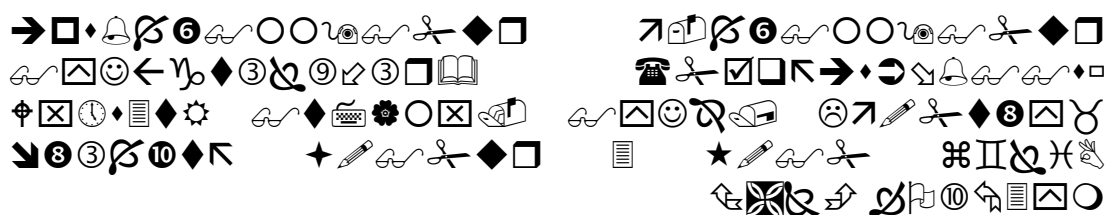
<sup>5</sup> B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), h.

Sejak dahulu, hukuman dianggap sebagai alat pendidikan yang tinggi kedudukannya, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya pada sidang pengadilan saja, tetapi diterapkan pada suatu bidang, termasuk bidang pendidikan.

Di bidang pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan dan oleh karenanya, hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat. Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>6</sup>

Para siswa sebaiknya diberi tahu secara terbuka dan terus terang tentang sanksi yang akan diterapkan. Peraturan dan tata tertib yang baik dan lengkap tentu memuat juga secara rinci tentang sanksi dan ancaman hukuman yang kira-kira akan ditimpakan kepada para pelanggarnya. Dengan demikian pada waktu peraturan dan tata tertib ini didiskusikan dan dikomunikasikan kepada pemakai. Cara penyusunan terbaik untuk pelaksanaan hukuman adalah memasang setiap jenis hukuman dengan aspek-aspek kegiatan yang dikaitkan dengan peraturan dan tata tertib.

Sebagaimana firman Allah telah memberikan contoh penerapan sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:



Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja baik, laki-laki atau perempuan yang mencuri akan mendapatkan sanksi potong tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt.

<sup>6</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta 1991), h. 153

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, khususnya dalam meningkatkan disiplin siswa di sekolah walaupun masih dalam kondisi pro dan kontra, akan tetapi pada kenyataan di lapangan masih banyak lembaga pendidikan sekarang yang masih menerapkan, khususnya di Pondok Pesantren, tetapi kalau di sekolah-sekolah umum lainnya sudah hampir tidak ditemukan lagi.

Dari penjejukan awal yang penulis kerjakan, yaitu berdasarkan kondisi objektif di lapangan diketahui bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin termasuk sekolah yang menerapkan adanya sanksi bagi siswa yang tidak mentaati peraturan atau ketentuan dalam tata tertib sekolah. Pelanggaran peraturan dalam tata tertib di sekolah tersebut tergolong tinggi. Penerapan sanksi fisik lebih dominan dibandingkan dengan sanksi mental. Sanksi fisik diterakan seperti hukuman berlari keliling lapangan, dijemur di lapangan, membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekolah, dikeluarkan dari kelas bahkan dikeluarkan dari sekolah tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam dan mengadakan tindakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kedisiplinan Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pengaruh lingkungan terhadap diri siswa seperti alat pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, sarana dan prasarana.

2. Dalam proses pendidikan yang berlangsung secara formal di sekolah guru sebagai pendidik, motivator, fasilitator akan sangat memberikan dampak terhadap perilaku dan kebiasaan murid itu sendiri.
3. Kurangnya penegakkan tata tertib sekolah seperti pada sekolah sekolah formal pada tingkat lebih tinggi.
4. Di dalam lingkungan sekolah siswa perlu mendapat pengawasan sehari hari dalam bertingkah laku dan bertindak. Pola tingkah laku itu hendaknya diarahkan kepada etika dan tata krama.

### **C. Fokus Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin?

### **D. Alasan memilih judul**

Beberapa pokok pikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah:

1. Mengingat tingkat pelanggaran tata tertib sekolah yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi dalam menunjang disiplin siswa adalah hal yang perlu dilaksanakan di sekolah.



2. Kesadaran dalam melaksanakan tata tertib atau peraturan sekolah merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa yang akhirnya ikut menyukkseskan gerakan disiplin pada nasional.
3. Mengingat penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan tata tertib sekolah merupakan salah satu unsur yang turut menentukan dalam menunjang disiplin belajar siswa serta suatu proses pembentukan watak atau prilaku yang lebih baik.
4. Sepengetahuan penulis dan juga didukung dengan informasi pihak sekolah yang diteliti bahwa sampai saat ini belum ada yang meneliti permasalahan yang sama.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah di Madrasah Al-Istiqamah Banjarmasin.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai:

1. Sebagai bahan informasi, pertimbangan dan pokok pikiran dalam upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah-sekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Sebagai Bahan masukan dan informasi dalam menentukan cara yang tepat untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan bentuk-bentuk dan konsep penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan sekolah ke arah yang lebih baik pada sisiwa sekolah.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta meperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam.
5. Sebagai bahaan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.
6. Bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam mengadakan penelitian lebih mendalam lagi dari aspek yang berbeda.
7. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Tarbiyah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Landasan teoritis tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan di sekolah, yang meliputi pengertian sanksi, pengertian peraturan di sekolah, teori-teori penerapan sanksi dalam pendidikan, jenis dan syarat penerapan sanksi dalam pendidikan, tujuan dan metode pemberian sanksi dalam pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran peraturan di sekolah.

Bab III. Metode Penelitian, yang membahas tentang subjek dan objek, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV. Laporan Hasil Penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.